

Peran Intelijen Maritim Guna Membangun Budaya Maritim Indonesia sebagai Pilar dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia

Widyanto Pudyo P¹, Moeljadi², Adi Kusumaningrum³, Windu Wahyu Wijaya⁴

Program Ketahanan Nasional, Universitas Brawijaya, Malang Indonesia^{1,2,3}

Pusat Kerjasama Internasional TNI, Mabes TNI, Jakarta Indonesia⁴

Email : widhi9843al@gmail.com¹, moeljadip@ub.ac.id²,
adi_ningrum@ub.ac.id³, karlanbinsukarja@gmail.com⁴

Abstrak

Tulisan ini berisi hasil penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tentang peran yang dapat dimainkan oleh komunitas intelijen maritim di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam upayanya membangun kembali budaya maritim Indonesia yang merupakan pilar pertama dari lima pilar utama untuk mewujudkan nusantara. negara sebagai tumpuan maritim global. Mengenai budaya bahari di Indonesia, orang awam akan naif berpikir bahwa secara otomatis akan menjadi identitas nasional bangsa Indonesia, mengingat negara ini adalah negara kepulauan dan nenek moyang Indonesia dikenal sebagai pelaut tangguh yang telah menaklukkan lautan. Namun, kolonialisme dan alasan politik di masa lalu telah menyebabkan Indonesia begitu lama mengabaikan banyak potensi yang berasal dari kekayaan sumber daya maritimnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa teori tentang budaya, budaya maritim, pembentukan identitas, identitas nasional dan fungsi intelijen maritim dikonsultasikan untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang keberadaan budaya maritim di Indonesia dan kemungkinan komunitas intelijen maritim untuk merevitalisasinya yang saat ini mulai memudar. Setelah melakukan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa komunitas intelijen maritim pasti akan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam program pengembangan kembali budaya maritim di Indonesia melalui tiga fungsi utamanya: investigasi, kontra-intelijen dan psy-war untuk menciptakan kepastian. kondisi yang kondusif bagi budaya bahari di Indonesia untuk memperoleh kembali tempat dan eksistensinya dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan cita-citanya menjadi poros maritim dunia.

Kata Kunci: *Maritim, Budaya, Intelijen*

Abstract

This paper contains the results of a qualitative descriptive study to describe the role that the maritime intelligence community in Indonesia can play in assisting the government in its efforts to rebuild Indonesia's maritime culture which is the first pillar of the five main pillars for realizing the archipelago. Country as a global maritime pedestal. Regarding maritime culture in Indonesia, ordinary people will be naive to think that it will automatically become the national identity of the Indonesian nation, considering that this country is an archipelagic country and Indonesia's ancestors were known as tough sailors who conquered the seas. However, colonialism and political reasons in the past have caused Indonesia for so long to ignore the many potentials that come from its wealth of maritime resources to improve people's welfare. Several theories on culture, maritime culture, identity formation, national identity and the function of maritime intelligence were consulted to get a good picture of the existence of maritime culture in Indonesia and the possibility of the maritime intelligence community to

revitalize it which is currently fading. After conducting a literature study, it can be concluded that the maritime intelligence community will definitely be able to make a valuable contribution to the maritime cultural redevelopment program in Indonesia through its three main functions: investigation, counter-intelligence and psy-war to create certainty. Conducive conditions for maritime culture in Indonesia to regain its place and existence in the life of the nation to realize its aspirations to become the world's maritime axis.

Keywords: *maritime, culture, intelligence*

PENDAHULUAN

Pada KTT Asia Timur ke-9^{pada} November 2014, Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan kebijakan atau niat pemerintahannya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui 5 pilar utama sebagai program pembangunan yang perlu dilaksanakan. Kelima pilar utama tersebut adalah (1) membangun budaya bahari Indonesia dalam rangka mengingatkan bangsa bahwa jati diri, kemakmuran, dan masa depannya pada prinsipnya ditentukan oleh cara negara mengelola lautnya; (2) menjaga laut dan sumber daya kelautan, dengan fokus membangun kedaulatan hasil laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) mengutamakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, industri logistik dan perkapalan, serta pariwisata bahari; (4) memperkuat diplomasi maritim, kerjasama di bidang maritim, menghilangkan sumber konflik di laut seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; dan (5) membangun kekuatan pertahanan laut untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan laut serta yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan laut.

Dilihat dari susunan lima pilar utama tersebut, budaya bahari dianggap sebagai prioritas utama. Menurut Grondona, Harrison dan Huntington (2000) budaya merupakan faktor penting yang dapat membantu menjelaskan berbagai tingkat keberhasilan di jalan menuju pembangunan. Budaya juga telah dilihat sebagai pengaruh besar dalam pembentukan peradaban. “ *Peradaban adalah entitas budaya* ” (Huntington, 1996). Budaya maritim harus dianggap sebagai identitas nasional Indonesia yang dapat menciptakan dan memperkuat solidaritas antar sesama bangsa dan mempersatukan anggota negara yang beragam. Meski demikian, budaya bahari seakan semakin memudar dari kehidupan masyarakat di negara kepulauan ini karena selama ini Indonesia lebih banyak fokus pada pembangunan sektor agraria daripada pembangunan sektor maritim. Oleh karena itu, pemerintah memandang sudah saatnya pembangunan kembali budaya bahari di Indonesia dilakukan untuk mendukung ambisi globalnya.

Sedangkan untuk revitalisasi budaya bahari, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan rencana aksi yang perlu dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan maritim dengan beberapa kementerian dan lembaga sebagai pemangku kepentingan utamanya. Rencana aksi pertama Kebijakan Maritim Indonesia berlangsung dari 2016 hingga 2019, dan rencana aksi kedua Kebijakan Maritim Indonesia berlangsung dari 2020 hingga 2024. Sebelum kebijakan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global diambil, perspektif maritim tampaknya tidak menjadi “isu penting” di benak masyarakat Indonesia yang tercermin dari minimnya muatan kelautan dalam kurikulum nasional dan buku pelajaran sejarah bagi siswa Indonesia (Wasino, 2013). Namun demikian, Singgih Tri Sulistiyono (2017) dalam penelitiannya yang dilakukan setelah pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia, masih menemukan bahwa aspek maritim belum diajarkan secara proporsional dalam mata pelajaran sejarah di sekolah menengah atas di Indonesia .

Berkaitan dengan agenda menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, komunitas intelijen maritim di Indonesia sebagai salah satu elemen bangsa harus dapat mendukung karya-karya raksasa tersebut menuju pencapaian kebijakan pemerintah tersebut, terutama realisasi yang pertama

dari lima kebijakan tersebut. pilar, yaitu membangun kembali atau merevitalisasi budaya bahari Indonesia. Mengingat komunitas intelijen sebagai garda pertama pertahanan negara, komunitas intelijenlah yang harus pertama kali mengidentifikasi penurunan nilai budaya maritim dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan merupakan tugas komunitas intelijen juga untuk memberikan peringatan kepada para pemimpin nasional sebagai penggunaannya tentang bahaya kehilangan identitas sebagai bangsa maritim.

Untuk dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai faktor-faktor pendukung dan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang dihadapi oleh komunitas intelijen maritim untuk melakukan tugas-tugasnya, makalah ini membatasi topik pembahasan yang terutama akan fokus pada pentingnya revitalisasi budaya maritim. dan tentang fungsi dan sistem kerja intelijen maritim dalam membantu program pengembangan kembali budaya maritim di Indonesia. Untuk mendukung argumentasi tersebut, akan disajikan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga memungkinkan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian, "Peran apa yang dapat dimainkan oleh komunitas intelijen maritim untuk membantu pemerintah dalam program re-development of budaya bahari di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia".

Budaya

Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) di University of Minnesota, AS, mendefinisikan budaya sebagai pola perilaku dan interaksi bersama, konstruksi kognitif, dan pemahaman yang dipelajari melalui sosialisasi. Dengan demikian, budaya dapat dilihat sebagai pertumbuhan identitas kelompok yang dipupuk oleh pola-pola sosial yang unik bagi kelompok tersebut. Menurut Cristina De Rossi, antropolog di Barnet and Southgate College di London, budaya mencakup agama, makanan, apa yang kita kenakan, bagaimana kita memakainya, bahasa kita, pernikahan, musik, apa yang kita yakini benar atau salah, bagaimana kita duduk. meja, bagaimana kita menyapa pengunjung, bagaimana kita berperilaku dengan orang yang kita cintai, dan sejuta hal lainnya.

Identitas dan Formasi Identitas

Identitas adalah gambaran tentang keberadaan dan rasa memiliki. Identitas terdiri dari dua pilar: pengenalan dan diidentifikasi (Eralp 1997). Individu diidentifikasi sebagai 'diri' dan masyarakat adalah pengidentifikasi utama sebagai 'orang lain'. Identitas merupakan fenomena sosial yang dimulai dengan proses pembentukan identitas melalui interaksi dengan 'yang lain' atau melawan 'yang lain'. Seseorang cenderung menginternalisasi dan mempraktikkan perilaku, nilai, dan norma masyarakat tempat dia tinggal.

Côté & Levine (2002) menyatakan bahwa orientasi budaya dapat mempengaruhi pendekatan pembentukan identitas. Misalnya, masyarakat dengan orientasi budaya individualistis akan cenderung mengedepankan pembentukan identitas melalui eksplorasi dan mengutamakan pengembangan diri. Namun, masyarakat dengan orientasi budaya kolektif akan cenderung mempromosikan pembentukan identitas dengan keanggotaan kelompok dan memprioritaskan saling ketergantungan antar individu (Bosma & Kunnen, 2001).

Identitas Budaya

Model Tiga Tahap Pengembangan Identitas Etnis Jean S. Phinney adalah pandangan yang diterima secara luas tentang pembentukan identitas budaya yang terdiri dari:

Tahap 1: Identitas Etnis yang Belum Diperiksa;

Pada tahap ini individu belum mengeksplorasi etnisitasnya. Beberapa siswa minoritas mungkin awalnya menerima nilai dan sikap dari budaya mayoritas. Individu tidak mengamati masalah sendiri dan mengambil nilai dan pendapat orang lain tanpa bertanya.

Tahap 2: Pencarian Identitas Etnis;

Tahap ini merupakan pusat pengembangan identitas etnis (periode eksplorasi). Individu mencapai tingkat ini ketika mereka menemukan situasi yang menyebabkan mereka mengeksplorasi identitas etnis mereka.

Tahap 3: Pencapaian Identitas Etnis

Tahap ini ditandai dengan penerimaan, internalisasi, dan pemahaman yang jelas tentang etnis seseorang. Ini adalah tahap di mana individu menerima perbedaan budaya antara kelompok etnis seseorang dan budaya mayoritas. Tahap ini mewakili hasil ideal dari proses identitas.

Identitas Nasional

Jika anggota satu negara-bangsa/negara dengan keragaman etnis yang tinggi seperti Indonesia memiliki rasa identitas nasional yang lebih kuat daripada identitas etnisnya, maka identitas nasional dapat memoderasi dampak konflik etnis. Sejalan dengan itu, identitas nasional dapat menjadi kekuatan pemersatu atau inklusi yang dapat meredam konflik etnis (Transue, 2007).

1. Maritim

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011 : 879), kata “maritim” berarti (1) segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, dan (2) yang berkaitan dengan laut. navigasi dan perdagangan di laut. Secara etimologis, kata “maritime” berasal dari bahasa latin, “mare” yang berarti laut.

2. Budaya Maritim

Keberadaan budaya bahari dalam masyarakat atau kelompok masyarakat yang menjadikan berbagai suku bangsa di kepulauan Indonesia menarik banyak peneliti untuk menelitinya, beberapa di antaranya dapat dilihat di bawah ini:

Peneliti	Tahun	Judul	Topik yang dipelajari			Temuan
			Budaya Bahari	Poros Maritim Dunia	Intelijen maritim	
Melinda A. Kambey, Djuwita RR Aling, Christian R. Dien	2020	Eksistensi budaya bahari pada kelompok nelayan di Desa Malalayang Dua, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia	X	-	-	Berbagai bentuk budaya bahari yang dilestarikan oleh suatu masyarakat di Indonesia
Supratikno Rahardjo	2019	Konvensi Internasional vs Kepentingan Nasional: Kontestasi Antar Instansi Pemerintah Indonesia tentang Pelestarian Warisan Budaya Bawah Laut	X	-	-	Warisan budaya bawah laut merupakan sumber konflik antar lembaga pemerintah Indonesia.
Oktavianus	2019	Bahasa dan Budaya Maritim: Identitas dan Pengayaan Budaya Bangsa	X	-	-	Indonesia sebagai negara maritim juga dapat dilacak dengan banyaknya

leksikon dan peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berasal dari segala sesuatu yang berkaitan dengan laut.

3. Intelijen

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dalam Bab 1 disebutkan bahwa intelijen adalah pengetahuan, pengorganisasian, dan kegiatan yang dikaitkan dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui cara kerja deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penyangkalan dan penanggulangan segala ancaman terhadap keamanan nasional.

4. Intelijen Maritim

Tidak ada yang namanya intelijen maritim dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Selama ini intelijen maritim di Indonesia belum dimasukkan sebagai bagian dari intelijen negara. Namun untuk keperluan penelitian ini, dengan mengacu pada beberapa informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dapat ditarik kesimpulan mengenai intelijen maritim, yaitu intelijen yang bekerja di ranah maritim, cakupannya lebih besar dari intelijen angkatan laut dan melakukan bisnis yang hampir sama. sebagai cabang intelijen lainnya: aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisis, produksi, dan penyebaran semua sumber intelijen (Humint, Techint, Masint, Sigint, Osint, Geoint, dan CI) untuk mendukung pengguna atau konsumen dalam membuat keputusan sebaik mungkin. Kegiatan intelijen maritim di Indonesia selama ini telah dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah antara lain: TNI Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Laut dan Udara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Keamanan Laut dan Industri Maritim.

METODE

Makalah ini ditulis dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman publik yang ada tentang komunitas intelijen maritim di Indonesia dan peran yang dapat dimainkan oleh kelompok untuk merevitalisasi budaya maritim yang dianggap penting oleh pemerintah Indonesia dalam membuat negara kepulauan sebagai poros maritim dunia. Makalah ini memanfaatkan data bekas yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Untuk dapat menggambarkan situasi nyata di lapangan yang diteliti secara ilmiah, beberapa definisi dan teori tentang budaya, pembentukan identitas nasional, budaya maritim, intelijen, intelijen maritim dan peraturan yang ada terkait dengan itu digunakan untuk membatasi objek penelitian. Hasil investigasi bersifat eksploratif untuk mengidentifikasi, menghitung dan menguraikan masalah atau pertanyaan penelitian, terutama mengenai peran yang dapat dilakukan oleh komunitas intelijen maritim dalam membangun kembali budaya maritim di Indonesia yang telah memudar karena kekuasaan kolonial. dan lanskap politik dan kepentingan di masa lalu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara maritim berbentuk kepulauan yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan. Sejak zaman dahulu ada beberapa kerajaan maritim yang kuat seperti: Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Mataram dll memerintah di kepulauan Indonesia di mana budaya maritim sangat berkembang di antara masyarakatnya yang dapat mendukung kejayaan kerajaan-kerajaan itu. Namun, kemudian kedatangan penguasa kolonial Belanda pada abad ke-16^{tiba}-tiba mengubah wajah Indonesia dari negara maritim menjadi negara yang berbasis darat dengan memberlakukan pada rakyat Indonesia wajib bercocok tanam, yang hasil panennya dinikmati oleh mereka sendiri. konsumsi sendiri dan berhasil memperkaya mereka melalui perdagangan global. Dan setelah merdeka pada tahun 1945, orientasi pembangunan nasional di Indonesia yang sudah berbasis tanah belum bergeser karena mantan pemimpin nasional Indonesia masih memiliki kepentingan lebih dalam mengembangkan sektor agraria. Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 kemudian memberikan harapan baru untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Setelah diadopsinya UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982 yang antara lain mengacu pada deklarasi tersebut, Indonesia sejak saat itu diakui sebagai negara kepulauan.

Setelah pertarungan diplomatik di forum global, langkah penting lain yang perlu dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim adalah mengubah pola pikir bangsa bahwa wilayah laut Indonesia yang lebih besar dari wilayah daratannya tidak boleh diabaikan dan dilupakan. karena mengandung kekayaan laut yang melimpah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo telah berhasil melakukan bagian penting ini dengan menetapkan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbeda dengan para pendahulunya sebelumnya, ia secara tegas menyatakan pentingnya pengelolaan aset maritim dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk mencapai ambisi global Indonesia, pemerintah telah menyiapkan lima pilar sebagai landasan bagi negara untuk menjadi tumpuan maritim global, yang pertama adalah membangun kembali atau merevitalisasi budaya maritim Indonesia untuk mengingatkan bangsa bahwa identitasnya, kemakmuran dan masa depan pada prinsipnya ditentukan oleh cara negara mengelola lautnya. Sama seperti orang awam yang mungkin berpikir bahwa budaya bahari secara otomatis akan menjadi identitas bangsa Indonesia, banyak penelitian yang telah dilakukan di nusantara menemukan keberadaan budaya bahari Indonesia dalam berbagai bentuk, antara lain ritual sebelum melaut, kearifan lokal, keterampilan membuat perahu dll. Sedangkan untuk identitas maritimnya masih dipertanyakan. Ada pernyataan negatif bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut, bukan bangsa Indonesia sekarang karena saat ini sedikit generasi muda Indonesia yang ingin menjadi nelayan sebagai profesinya. Dan terkait dengan kontribusi kekayaan bahari Indonesia bagi kemakmuran rakyat Indonesia, masih jauh dari harapan ideal. Kendala yang dihadapi nelayan di lapangan antara lain kurangnya keterampilan yang diperlukan, penguasaan teknologi yang buruk dan keterbatasan aksesibilitas terhadap pendanaan produktif. Menjadi negara maritim berarti tidak hanya memiliki wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratannya, tetapi juga dan yang terpenting mampu menjaga dan memanfaatkannya untuk kepentingan negara di masa yang akan datang.

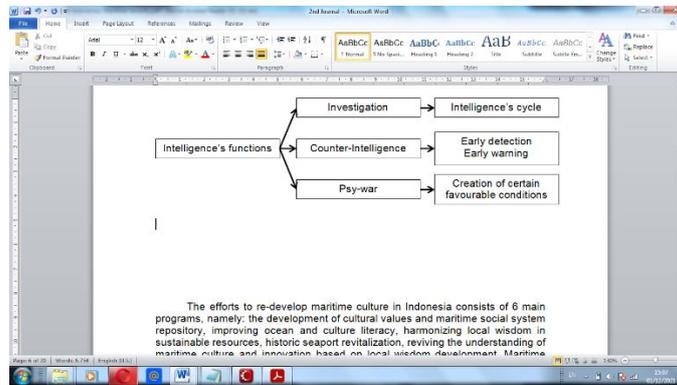
Sebagai simbol kebersamaan, semua elemen bangsa harus membantu pemerintah dalam mencari hilangnya identitas maritim dari kehidupan kontemporer bangsa Indonesia. Pendidikan, melalui pengajaran pelajaran sejarah atau pelajaran lain yang mengandung literasi budaya bahari, memegang peranan penting. Sayangnya, dan bertentangan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan poros maritim dunia menunjukkan hal lain. jalan sekitar. Konten

literasi budaya bahari belum banyak mendapat perhatian dalam kurikulum dan buku teks sejarah di Indonesia (Wasino, 2013 dan Singgih Tri Sulistiyono 2017). Temuan ini sangat disayangkan mengingat peran strategis yang dapat dimainkan oleh pendidikan untuk mengubah pola pikir dan perilaku laki-laki. Namun, mengacu pada Eaton (2002) peran pendidikan dalam membentuk identitas nasional hampir tidak dipelajari secara empiris, meskipun pentingnya jelas.

Menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan ini, makalah ini ingin memaparkan tentang peran yang dapat dimainkan oleh komunitas intelijen untuk membantu pemerintah dalam upayanya revitalisasi budaya maritim di Indonesia dalam upaya menjadikan negara kepulauan sebagai tumpuan maritim dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dalam pasal 4 disebutkan bahwa intelijen berperan untuk melakukan segala macam upaya deteksi dini dan peringatan dini dengan tujuan untuk mencegah, menyangkal dan memulihkan dari segala bentuk ancaman. Saat ini pemerintah Indonesia akan lebih memperhatikan aset maritim sebagai pendorong utama program pembangunan nasional, maka identitas maritim yang dianggap memudar dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, harus diidentifikasi oleh komunitas intelijen maritim sebagai faktor pelumpuh yang dapat mengganggu pencapaian tujuan nasional di masa depan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman adalah segala usaha, tugas, kegiatan dan tindakan yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri yang dianggap atau dapat dibuktikan membahayakan keselamatan dan keamanan bangsa, kedaulatan negara, integritas dan kepentingan nasional yang dilihat dari beberapa aspek yang berbeda; yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

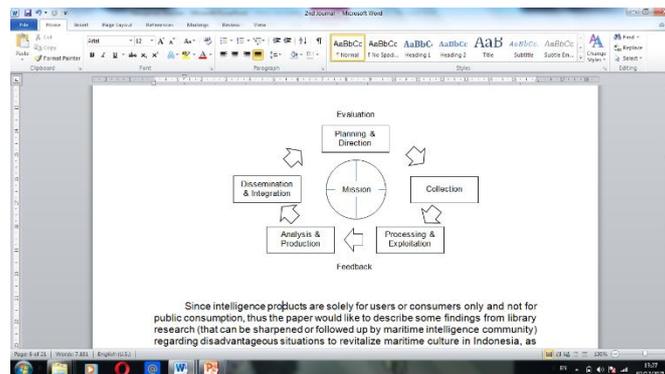
Keterlibatan komunitas intelijen dalam program revitalisasi budaya maritim di Indonesia masih relevan, mengingat sifat ancaman terhadap keamanan nasional kini telah berubah dari tradisional (state actor, war) menjadi non-tradisional (non-state actor, beyond war) ancaman yang cenderung multidimensi. Pergeseran ancaman dan tantangan membawa konsekuensi semakin besarnya peran intelijen sebagai garda terdepan sistem keamanan nasional. Intelijen harus mampu mengidentifikasi segala jenis ancaman, baik yang bersifat tradisional, non-tradisional, maupun hybrid. Identifikasi ancaman dan tantangan diperlukan sebagai langkah awal oleh komunitas intelijen untuk menjalankan tugas maksimalnya yaitu mengingatkan para pemimpin nasional sebagai pengguna atau konsumennya tentang bahaya gejolak tersebut.

Berkenaan dengan keterlibatan intelijen, tepatnya intelijen maritim, dalam program pengembangan kembali budaya maritim Indonesia, pertama-tama perlu diketahui tentang fungsi intelijen dan cara kerjanya. Di Indonesia, intelijen memiliki tiga fungsi yang harus dilakukan, yaitu: pertama, investigasi yang dilakukan dengan mengikuti siklus intelijen, kedua, kontra-intelijen untuk deteksi dini dan peringatan dini ancaman yang akan segera terjadi untuk mencegah, menyangkal dan memulihkan dari segala kemungkinan kerusakan. disebabkan oleh penyusupan musuh dan yang terakhir adalah perang psikologis dengan tujuan untuk menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh pengguna.



Gambar 1 Fungsi Intelijen

Sumber: Dikembangkan Oleh Penulis Dari Berbagai Sumber



Gambar 2 Siklus Intelijen

Sumber: Dikembangkan Oleh Penulis Dari Berbagai Sumber

Dilihat dari fungsi dan sistem kerjanya, komunitas intelijen maritim dapat membantu pemerintah untuk mendukung kebangkitan budaya maritim Indonesia yang gemilang di masa lalu dengan melakukan fungsi pertamanya yaitu penyelidikan menyeluruh yang mengikuti siklus intelijen pada semua aspek kehidupan. bangsa yang perlu ditingkatkan. Pertama, pengguna atau konsumen Intelijen Maritim dapat merencanakan penyelidikan menyeluruh tentang hampir punahnya identitas maritim dalam kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan asumsi awal. Kemudian mereka dapat mengirimkan permintaan ke agen lapangan yang disebut Elemen Penting Informasi atau EEI berkaitan dengan fenomena kontemporer, misalnya, “ Mengapa generasi muda di Indonesia kurang tertarik untuk bekerja di sektor maritim? “. Kemudian agen lapangan akan mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk dapat menjawab EEI. Agent handler akan memandu field agent dalam melakukan proses pencarian dan informasi yang diperoleh oleh field agent akan dikirimkan ke agent handler untuk diuji validitas dan reliabilitasnya melalui sistem saluran komunikasi klandestin. Setelah dianalisis dan digabungkan dengan informasi lain yang diperoleh melalui jenis kecerdasan lain, antara lain kecerdasan komunikasi, kecerdasan elektronik, kecerdasan sinyal dll, maka hasil penyelidikan secara keseluruhan akhirnya akan dilaporkan dan disebarluaskan kepada pengguna atau konsumen untuk proses pengambilan keputusan yang lebih baik. dan umpan balik.

Selanjutnya, pengguna atau konsumen komunitas intelijen maritim dapat menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dengan menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan operasi kontra intelijen yang terdiri dari empat langkah operasional: mendeteksi, menyelidiki, mengeksploitasi, dan meniadakan. , jika diketahui adanya keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, agen intelijen asing yang memperburuk situasi. Tujuan operasi kontra-intelijen juga dimaksudkan untuk melindungi personel sendiri dari pengaruh atau campur tangan pihak asing. Atau jika tidak ada keterlibatan “orang

luar” , maka pelaksanaan operasi kontra intelijen juga dapat ditujukan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap tidak mendukung agenda yang ingin dibentuk, dalam hal ini revitalisasi budaya bahari. Langkah pertama operasi kontra-intelijen dilakukan untuk mengetahui petunjuk, petunjuk atau indikasi adanya jaringan agen intelijen asing yang bekerja secara sembunyi-sembunyi di dalam wilayah tersebut. Langkah kedua dimaksudkan untuk menyelidiki kenyataan atau fakta tertentu berdasarkan petunjuk, petunjuk dan indikasi yang diperoleh sehingga setelah itu agen lapangan dapat mengumpulkan bukti sebanyak yang diperlukan untuk melakukan langkah berikutnya. Kemudian langkah ketiga perlu diambil untuk menggunakan operasi klandestin lawan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin untuk pihak sendiri, dalam langkah ini, setiap agen intelijen asing yang ditangkap akan diubah menjadi agen ganda untuk mengungkap keseluruhan jaringan operasi klandestin lawan. Dan langkah keempat atau terakhir diperlukan untuk menetralkan atau menghentikan, baik secara hukum maupun ekstra-hukum, semua jaringan agen intelijen asing berdasarkan bukti dan saksi yang cukup. Tujuan operasi kontra intelijen terutama untuk deteksi dini dan peringatan dini terhadap segala kemungkinan ancaman dan tantangan yang dapat mengganggu kelancaran program pembangunan pemerintah.

Setelah berhasil menghentikan operasi jaringan agen intelijen asing di lapangan dan menegakkan hukum terhadap segala pelanggaran yang dapat membawa pengaruh buruk atau akibat buruk bagi program pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia, akhirnya komunitas intelijen maritim dapat menjalankan fungsi ketiganya yaitu adalah mengadakan perang batin dalam rangka menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan bagi budaya bahari di Indonesia untuk memperoleh kembali tempat dan keberadaannya dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan cita-citanya menjadi poros maritim dunia. Psywar digunakan untuk mengubah pendapat, sikap, emosi dan perilaku target yang dapat dilakukan pada level strategis, level taktis dan dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan sendiri, baik secara persuasif maupun koersif. Perang psy menargetkan individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Salah satu alat yang biasa digunakan dalam psywar adalah konflik budaya yang diarahkan untuk mengubah identitas, norma dan nilai target secara bertahap sesuai dengan tema dan tujuan dari psywar. Identitas maritim bangsa dapat direvitalisasi dengan meninggalkan pesan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya membangun kembali budaya maritim untuk mendukung negara mereka sebagai poros maritim dunia, biarkan mereka berpikir, biarkan mereka memutuskan dan biarkan mereka mengubah orientasi budaya mereka. Salah satu keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan psywar adalah mengurangi korban manusia dan peralatan karena kondisi psikologis musuh yang coba dipengaruhi. Seperti yang dikatakan Sun Tzu bahwa seni tertinggi dalam pertempuran adalah menaklukkan musuh tanpa mengadakan perang.

Karena produk intelijen semata-mata ditujukan untuk pengguna atau konsumen saja dan bukan untuk konsumsi publik, maka artikel ini ingin memaparkan beberapa temuan dari studi pustaka (yang dapat diasah atau ditindaklanjuti oleh komunitas intelijen maritim) mengenai situasi yang kurang menguntungkan untuk merevitalisasi budaya maritim di Indonesia. Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, ada kesalahan doktrin mendasar yang telah ditanamkan pada masyarakat Indonesia sejak pertama kali, bahwa Indonesia sebagian besar adalah negara agraris. Walaupun tidak sepenuhnya salah, namun jika indoktrinasi ini terus berlanjut maka secara tidak langsung akan menimbulkan paradigma yang salah bahwa bangsa Indonesia berjiwa agraris dan akan semakin menurunkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang sebenarnya bisa hidup dari hasil laut, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga untuk diekspor sebagai komoditas yang menguntungkan.

Kedua, meskipun begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun

bagaimanapun juga temuan menunjukkan bahwa muatan kelautan belum cukup berkembang dalam kurikulum dan buku teks sejarah untuk pelajar Indonesia. Temuan tersebut bertentangan dengan salah satu dari tiga dimensi prinsip pembangunan nasional, yaitu pembangunan dimensi manusia yang bertumpu pada pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental atau karakter.

Ketiga, warisan maritim bawah laut (BMKT) yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya maritim di Indonesia cenderung lebih dianggap sebagai “barang ekonomi” daripada sebagai “barang budaya” sehingga menjadi rebutan antara kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia (Supratikno Rahardjo, 2019), terutama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan yang membawahi Direktorat Konservasi Cagar Budaya dan Museum dan Komite Nasional Penyelamatan dan Pemanfaatan Benda Berharga dari Kapal Tenggelam (VOS), diketahui sebagai PANNAS-BMKT (NCSU-VOS). Jika kondisi ini dilihat dari sudut pandang intelijen, itu dianggap sebagai titik rapuh yang mungkin dimanfaatkan oleh musuh untuk membubarkan persatuan kita sebagai bangsa untuk mencapai niat jahat mereka dan memaksimalkan keunggulan mereka. Oleh karena itu, masalah ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Keempat, meskipun pemerintah Indonesia telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejalan dengan ambisi globalnya, namun keberadaan intelijen maritim masih dipertanyakan. Dalam kerangka hukum yang ada, intelijen maritim belum diakui sebagai bagian dari intelijen negara. Mungkin orang awam akan mempertimbangkan bahwa kegiatan intelijen maritim dapat dilakukan oleh intelijen kementerian atau non-kementerian yang sudah diakui oleh hukum nasional. Sebaliknya, cakupan intelijen maritim lebih besar daripada intelijen kementerian atau non-kementerian dan pengguna atau konsumennya mungkin berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda di domain maritim.

Diskusi

Segala kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang sebelumnya telah dihimpun antara lain dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga negara, harus dipertanggungjawabkan di hadapan wakil rakyat. Dan jika anggaran negara yang telah dialokasikan ke beberapa kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk angkatan laut dan polisi laut digunakan antara lain untuk mendanai kegiatan intelijen maritim, maka akan semakin sulit bagi kementerian dan lembaga tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya. penggunaan anggaran negara, karena kementerian dan lembaga tersebut tidak memiliki tugas khusus dalam melaksanakan kegiatan intelijen maritim yang membuat upaya intelijen maritim tidak terkoordinasi dengan baik. Parahnya lagi, kementerian dan lembaga tersebut akan dianggap melanggar aturan penggunaan anggaran negara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut keterlibatan komunitas intelijen maritim dalam program revitalisasi budaya maritim di Indonesia, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendorong legislatif untuk mengubah regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sehingga akan mudah bagi lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Selain itu, amandemen undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komunitas intelijen maritim Indonesia yang sebenarnya telah ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan segala upaya deteksi dini dan peringatan dini dengan tujuan untuk mencegah, menolak dan memulihkan dari segala bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. , komunitas intelijen maritim di negara kepulauan, melalui pelaksanaan fungsi dan sistem

kerjanya, dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan memudarnya budaya maritim yang dianggap sebagai faktor pelumpuh untuk menjadikan bangsa sebagai poros maritim dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles G. Levine, James Cté, *Identitas, Formasi, Agensi, dan Budaya: Sintesis Psikologis Sosial*, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2002
- Hapidin, Nurbiana Dhieni dan Yuli Pujianti, *Perspektif Pendidikan Transformatif: Literasi Budaya Maritim Masyarakat Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Indonesia*, ICELS, 2019
<https://carla.umn.edu/culture/definitions.html>
- Hüsamettin naç, Feyzullah nal, *Konstruksi Identitas Nasional di Zaman Modern: Perspektif Teoritis*, Jurnal Internasional Humaniora dan Ilmu Sosial, 2013
- JS Phinney, *Sebuah model tiga tahap perkembangan identitas etnis pada masa remaja*, New York: State University of New York Press, 1993.
- Multamia R.M.T. Lauder and Allan F. Lauder, *Maritime Indonesia and the Archipelagic Outlook*, Wacana, 2017
- Oktavianus, *Bahasa dan Budaya Maritim: Identitas dan Pemer kaya Budaya Bangsa*, Pustaka, 2019
- Panduan Implementasi Kurikulum Kemaritim*, Balibang Kemdikbud, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2017
- Singgih Tri Sulistiyono, *Tracking the Role of Education in Preserving National Identity: Maritime Aspect in the History Subject at Senior High School in Indonesia*, *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 2017
- Supratikno Rahardjo, *International Convention vs National Interest: Contestation among Indonesian Government Institutions on Underwater Cultural Heritage Conservation*, *Indonesian Journal of International Law*, 2019
- Supratikno Rahardjo, Nies Anggraeni, et al, *Warisan Budaya Maritim Nusantara*, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud, 2018
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Wasino, *Maritime Culture in Indonesian History Curriculum and Textbook, the Development and Alternative Solution*, Semarang State University, 2013